

PENGARUH DOKTRIN HAKKO ICHIU TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)

Hestiya¹, Clara Cynthia Putri Rahasri², Alif Nur Hafidz³, Kahfi Pratama⁴
^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
⁴Jurusan Manajemen Pendidikan, Universitas Pamulang
¹hesitya826@gmail.com, ²claracynthiaputrirahasri@gmail.com,
³alifnurhafidz709@gmail.com, ⁴kahfip6@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the influence of the Hakko Ichiu doctrine on Japanese occupation policies in Indonesia during the period of 1942–1945. Hakko Ichiu, which literally means “eight corners of the world under one roof,” became the ideological foundation of the Japanese Empire’s expansion by positioning Japan as the leader of Asia that aimed to liberate Asian nations from Western imperialism. This research aims to analyze the implementation of the doctrine in the fields of education, mass media propaganda, and socio-political mobilization during the Japanese occupation in Indonesia. The study employed a historical research method using qualitative approaches through the analysis of Dutch newspaper archives, historical documents, and related literature. The findings reveal that the Hakko Ichiu doctrine was systematically implemented as an ideological instrument to legitimize Japanese domination in Indonesia. In practice, the doctrine created contradictions between the rhetoric of Asian brotherhood and the reality of exploitative and militaristic colonialism. Japanese propaganda successfully mobilized Indonesian society through organizations such as PETA, Seinendan, and Jawa Hokokai. However, the occupation also caused severe economic hardship, social suffering, and humanitarian crises among the Indonesian people. Therefore, the study concludes that Hakko Ichiu functioned not only as a political doctrine of Asian unity but also as a strategic tool to strengthen Japanese imperial interests in occupied territories.

Keywords: Hakko Ichiu, Japanese Occupation, Indonesia, Japanese Propaganda, Imperialism

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh doktrin Hakko Ichiu terhadap kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia pada periode 1942–1945. Hakko Ichiu yang secara harfiah berarti “delapan penjuru dunia dalam satu rumah” menjadi landasan ideologis ekspansi Kekaisaran Jepang dengan menempatkan Jepang sebagai pemimpin Asia yang bertujuan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari imperialisme Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin tersebut dalam bidang pendidikan, propaganda media massa, dan mobilisasi sosial-politik selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui analisis arsip surat kabar Belanda, dokumen historis, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Hakko Ichiu diterapkan secara sistematis sebagai instrumen ideologis untuk melegitimasi dominasi Jepang di Indonesia. Dalam praktiknya, doktrin tersebut menimbulkan kontradiksi antara retorika persaudaraan Asia

dengan realitas kolonialisme militer yang eksploitatif. Propaganda Jepang berhasil memobilisasi masyarakat Indonesia melalui organisasi seperti PETA, Seinendan, dan Jawa Hokokai. Namun, pendudukan Jepang juga menimbulkan penderitaan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakko Ichiu tidak hanya berfungsi sebagai doktrin politik persatuan Asia, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat kepentingan imperialisme Jepang di wilayah pendudukan.

Kata Kunci: Hakko Ichiu, Pendudukan Jepang, Indonesia, Propaganda Jepang, Imperialisme

A. Pendahuluan

Pendudukan Jepang di Indonesia pada periode 1942–1945 merupakan fase penting dalam sejarah kolonialisme di Nusantara yang meninggalkan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbeda dengan kolonialisme Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad, pendudukan Jepang yang relatif singkat namun berlangsung secara intensif membawa perubahan struktural dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji ialah bagaimana Jepang memanfaatkan konstruksi ideologis sebagai alat legitimasi kekuasaan kolonial, khususnya melalui doktrin Hakko Ichiu.

Doktrin Hakko Ichiu, yang secara harfiah berarti “delapan penjuru dunia dalam satu rumah”, menjadi landasan filosofis ekspansi Kekaisaran Jepang

di kawasan Asia-Pasifik. Gagasan ini berakar dari ajaran Shinto dan dikaitkan dengan Kaisar Jimmu sebagai kaisar pertama Jepang yang dipercaya sebagai keturunan dewi matahari Amaterasu. Menurut Kratoska (1997) dan Shiraishi (1986), doktrin tersebut tidak hanya berfungsi sebagai gagasan spiritual, tetapi juga digunakan sebagai instrumen ideologis untuk melegitimasi dominasi Jepang atas wilayah-wilayah pendudukannya, termasuk Indonesia.

Arsip surat kabar Belanda tahun 1941 menunjukkan bagaimana doktrin Hakko Ichiu dipromosikan secara internasional oleh pemerintah Jepang. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Jepang Yosuke Matsuoka menyatakan bahwa “upaya kebijakan luar negeri Jepang diarahkan agar semua negara di dunia menempati posisi yang semestinya menurut semangat Hakko Ichiu, ideal yang telah menjadi dasar pendirian negara

kami” (Bataviaasch Nieuwsblad, 1941). Selain itu, Matsuoka juga menegaskan bahwa Hindia Belanda dan Indochina harus berada dalam hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dengan Jepang (De Sumatra Post, 1941). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari target strategis Jepang sebelum pendudukan dimulai.

Pada tataran retorika, Hakko Ichiu menawarkan narasi pembebasan bangsa-bangsa Asia dari imperialisme Barat. Jepang menampilkan diri sebagai “saudara tua” yang datang untuk membebaskan Asia dari dominasi kolonial Eropa. Propaganda Jepang disebarluaskan melalui slogan seperti “Jepang Cahaya Asia”, “Pelindung Asia”, dan “Pemimpin Asia” guna membangun citra Jepang sebagai pembebas. Dalam salah satu arsip propaganda Jepang disebutkan bahwa “kami tidak pernah menyimpan kebencian sedikit pun terhadap Amerika atau Inggris, seluruh tindakan kami hanyalah akibat dari kehendak Tuhan” (De Sumatra Post, 1941). Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana Jepang membangun citra moral dan spiritual

untuk memperoleh legitimasi politik di wilayah pendudukan.

Meskipun demikian, realitas pendudukan Jepang menunjukkan adanya kontradiksi antara propaganda persaudaraan Asia dengan praktik kolonialisme militer yang eksploitatif. Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendukung kepentingan perang, seperti mobilisasi romusha, pengawasan ketat terhadap media, indoktrinasi pendidikan, serta pembentukan organisasi-organisasi massa. Dalam konteks ini, doktrin Hakko Ichiu tidak hanya berfungsi sebagai wacana ideologis, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk mengendalikan masyarakat Indonesia.

Penelitian mengenai pendudukan Jepang di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para sejarawan dengan beragam perspektif. Kurasawa (1987) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan dijadikan alat paling sistematis untuk menanamkan ideologi Asia Raya kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, propaganda melalui media massa seperti surat kabar, radio, dan poster digunakan secara intensif untuk

membentuk opini publik. Sementara itu, Jowett dan O'Donnell (2018) menunjukkan bahwa mobilisasi romusha dan pembentukan organisasi massa dipresentasikan sebagai bentuk kontribusi sukarela bagi keluarga besar Asia Timur Raya. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek propaganda atau mobilisasi politik secara terpisah, sehingga kajian yang secara khusus menelaah hubungan antara doktrin Hakko Ichiu dengan implementasi kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh doktrin Hakko Ichiu terhadap kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, propaganda media massa, dan mobilisasi sosial-politik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui analisis arsip surat kabar Belanda yang terbit pada tahun 1941–1947, dokumen pemerintahan Jepang seperti *Kan Po*, serta berbagai literatur pendukung lainnya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana sebuah doktrin ideologis ditransformasikan menjadi

instrumen kekuasaan kolonial selama masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Takashi Shiraishi dalam *An Age in Motion* mengenai wacana Asia modern dan Benedict Anderson dalam *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation* tentang mobilisasi politik pada masa pendudukan Jepang. Shiraishi menjelaskan bahwa sebelum Jepang masuk ke Indonesia telah berkembang wacana kebangkitan Asia dalam gerakan nasionalisme awal abad ke-20. Jepang kemudian memanfaatkan wacana tersebut untuk memperkuat klaimnya sebagai pemimpin Asia. Sementara itu, Anderson menunjukkan bahwa keberhasilan Jepang dalam memobilisasi masyarakat sangat bergantung pada kemampuan mengubah ideologi menjadi struktur organisasi massa yang efektif. Kombinasi kedua perspektif tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Hakko Ichiu berfungsi sebagai jembatan antara wacana ideologis

dan praktik kolonial Jepang di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis untuk mengkaji pengaruh doktrin Hakko Ichiu terhadap penerapan kebijakan Jepang di Indonesia pada periode 1942–1945. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap fenomena politik, sosial, dan ideologis dalam konteks sejarah kolonial Jepang di Indonesia. Metode historis digunakan untuk menelusuri, mengkaji, dan merekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber sejarah yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai hubungan antara doktrin Hakko Ichiu dan kebijakan pendudukan Jepang.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari arsip surat kabar Belanda periode 1941–1947 seperti *Bataviaasch Nieuwsblad* dan *De Sumatra Post*, serta dokumen pemerintahan Jepang seperti *Kan Po* yang memuat kebijakan dan propaganda Jepang

selama masa pendudukan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan poster propaganda, pidato pejabat Jepang, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan implementasi doktrin Hakko Ichiu di Indonesia. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya historiografi yang membahas pendudukan Jepang, propaganda politik, serta imperialisme Jepang di kawasan Asia-Pasifik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi arsip. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tahapan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian dan kredibilitas data yang digunakan. Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan hubungan antara doktrin Hakko Ichiu dan kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun tahap historiografi dilakukan melalui penyusunan hasil penelitian secara sistematis dan kronologis agar

menghasilkan penjelasan historis yang komprehensif.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Doktrin Hakko Ichiu sebagai Dasar Ideologi Ekspansi Jepang

Doktrin Hakko Ichiu yang secara harfiah berarti “delapan penjuru dunia dalam satu rumah” menjadi salah satu landasan ideologis utama ekspansi Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II. Jepang memproyeksikan doktrin tersebut sebagai visi moral yang menempatkan Jepang sebagai pemimpin bangsa-bangsa Asia dalam melawan imperialisme Barat. Namun, dalam praktiknya, doktrin tersebut digunakan sebagai legitimasi ideologis untuk memperluas dominasi politik dan militer Jepang di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kratoska (1997) dan Shiraishi (1986) yang menjelaskan bahwa Hakko Ichiu berfungsi sebagai instrumen politik imperialisme Jepang.

Doktrin ini berakar dari ajaran Shinto dan dikaitkan dengan Kaisar Jimmu sebagai pendiri Kekaisaran Jepang. Tanaka Chigaku menjadi salah satu tokoh yang mempopulerkan gagasan tersebut

melalui konsep persatuan Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Dalam perkembangannya, ideologi ini berkaitan erat dengan gagasan Dai Toa Kyo-eiken atau Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang menempatkan Jepang sebagai pusat kekuasaan di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Arsip surat kabar Belanda tahun 1941 menunjukkan bahwa pemerintah Jepang secara aktif menyebarluaskan doktrin Hakko Ichiu melalui diplomasi internasional dan propaganda politik. Dalam pidato Menteri Luar Negeri Jepang Yosuke Matsuoka yang dimuat dalam *Bataviaasch Nieuwsblad* (1941), disebutkan bahwa kebijakan luar negeri Jepang diarahkan sesuai dengan semangat Hakko Ichiu untuk menciptakan tatanan dunia baru. Selain itu, Matsuoka juga menegaskan bahwa Hindia Belanda dan Indochina harus berada dalam hubungan yang erat dengan Jepang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari strategi geopolitik Jepang sebelum pendudukan dimulai.

Selain melalui diplomasi, Jepang juga membangun citra moral melalui propaganda media. Dalam arsip *De Sumatra Post* (1941), Jepang

digambarkan sebagai bangsa yang bertindak demi keharmonisan dunia dan pembebasan Asia dari imperialisme Barat. Akan tetapi, realitas di lapangan memperlihatkan adanya kontradiksi antara retorika persaudaraan Asia dengan praktik kolonialisme militer yang eksploitatif. Jepang tetap menjalankan sistem kontrol politik, eksploitasi ekonomi, dan mobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang.

Penerapan Doktrin Hakko Ichiu dalam Bidang Pendidikan

Salah satu implementasi paling sistematis dari doktrin Hakko Ichiu dilakukan melalui bidang pendidikan. Jepang memanfaatkan pendidikan sebagai sarana indoktrinasi untuk menanamkan loyalitas kepada Kaisar Jepang dan mendukung cita-cita Asia Timur Raya. Pada awal pendudukan, sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup dan seluruh sistem pendidikan diarahkan untuk menghapus pengaruh Barat.

Kurasawa (1987) menjelaskan bahwa sekolah dijadikan alat utama untuk menanamkan ideologi Jepang kepada masyarakat Indonesia. Bahasa Belanda dilarang, sedangkan bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar utama dan bahasa Jepang

dijadikan mata pelajaran wajib. Selain itu, siswa diwajibkan melakukan Seikerei, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang setiap pagi sebagai simbol kesetiaan terhadap Kekaisaran Jepang.

Jepang juga mendirikan berbagai jenis sekolah seperti Kokumin Gakko (Sekolah Rakyat), Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama), dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Atas). Di samping itu, pemerintah Jepang membuka sekolah kejuruan di bidang teknik, pertanian, dan pelayaran untuk mendukung kebutuhan perang. Dalam praktiknya, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai alat mobilisasi politik dan militer.

Kurikulum pendidikan pada masa pendudukan Jepang menekankan latihan fisik, kerja bakti (kinrohoshi), latihan militer, serta pengenalan budaya Jepang melalui senam pagi (taiso), penghormatan kepada Kaisar, dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Melalui kegiatan tersebut, ideologi Hakko Ichiu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan digunakan Jepang sebagai alat pembentukan identitas

politik dan loyalitas masyarakat terhadap kepentingan perang Jepang.

Propaganda Media Massa sebagai Instrumen Ideologis

Selain pendidikan, Jepang juga menggunakan propaganda media massa untuk menyebarkan doktrin Hakko Ichiu. Media seperti poster, radio, surat kabar, dan film dimanfaatkan untuk membangun citra Jepang sebagai pelindung Asia. Menurut Jowett dan O'Donnell (2018), propaganda merupakan upaya sistematis untuk memengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat demi kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks Indonesia, Jepang membentuk Departemen Propaganda (Sendenbu) yang bertugas mengendalikan informasi dan menyebarkan propaganda perang. Karena tingkat literasi masyarakat masih rendah, Jepang lebih banyak menggunakan media visual seperti poster dan film. Poster propaganda menampilkan tentara Jepang sebagai pembebas Asia dan menggambarkan persatuan bangsa-bangsa Asia di bawah kepemimpinan Jepang.

Salah satu propaganda paling terkenal adalah Gerakan 3A dengan

slogan "Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia". Gerakan tersebut bertujuan membangun sentimen anti-Barat dan memperoleh dukungan masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi Djawa Hokokai untuk menggalang pengabdian rakyat terhadap kepentingan perang Jepang.

Media film juga digunakan sebagai alat propaganda. Jepang mendirikan Jawa Eiga Kosha untuk mengelola perfilman dan memproduksi film-film propaganda yang menampilkan superioritas Jepang serta pentingnya persatuan Asia Timur Raya. Melalui propaganda media massa, Jepang berusaha menciptakan legitimasi moral atas pendudukannya di Indonesia.

Mobilisasi Sosial Politik dan Kontradiksi Praktik Kolonial Jepang

Dalam bidang sosial-politik, doktrin Hakko Ichiu diwujudkan melalui pembentukan organisasi-organisasi massa dan mobilisasi tenaga rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan PETA sebagai sarana mobilisasi masyarakat untuk

mendukung perang Asia Timur Raya. Menurut Anderson (1961), organisasi-organisasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat politik Jepang, tetapi juga menjadi sarana pembentukan disiplin dan loyalitas masyarakat terhadap pemerintahan militer Jepang.

Melalui propaganda persaudaraan Asia, Jepang menggambarkan mobilisasi tenaga rakyat sebagai bentuk pengabdian sukarela bagi keluarga besar Asia. Akan tetapi, kenyataannya masyarakat Indonesia mengalami eksploitasi yang berat, terutama melalui sistem kerja paksa romusha. Banyak romusha dikirim ke berbagai wilayah untuk membangun fasilitas militer dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tingkat kematian yang tinggi.

Kontradiksi antara propaganda dan praktik kolonial Jepang juga terlihat dari tindakan brutal Kempeitai sebagai polisi militer Jepang. Arsip surat kabar Aneta tahun 1947 mengungkap berbagai kasus penyiksaan terhadap masyarakat sipil selama masa pendudukan Jepang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa di balik retorika persaudaraan Asia, Jepang tetap menjalankan praktik

kolonialisme militer yang represif dan eksploitatif.

Analisis Teoretis Doktrin Hakko Ichiu

Berdasarkan perspektif Takashi Shiraishi dalam *An Age in Motion*, keberhasilan propaganda Jepang tidak terlepas dari berkembangnya wacana kebangkitan Asia sebelum pendudukan Jepang berlangsung. Jepang memanfaatkan semangat anti-Barat dan gagasan modernitas Asia yang telah berkembang dalam gerakan nasionalisme Indonesia untuk memperoleh legitimasi politik.

Sementara itu, Benedict Anderson dalam *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation* menjelaskan bahwa keberhasilan Jepang terletak pada kemampuannya mengubah ideologi menjadi mekanisme mobilisasi politik yang sistematis. Jepang membentuk organisasi-organisasi massa sebagai alat kontrol sosial dan sarana indoktrinasi masyarakat.

Kombinasi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa doktrin Hakko Ichiu bukan sekadar gagasan ideal mengenai persatuan Asia, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat kekuasaan kolonial

Jepang di Indonesia. Jepang memanfaatkan wacana persatuan Asia untuk memperoleh dukungan masyarakat, tetapi pada saat yang sama menerapkan kebijakan eksploitasi ekonomi, mobilisasi paksa, dan kontrol politik demi kepentingan perang. Dengan demikian, doktrin *Hakko Ichiu* lebih berfungsi sebagai legitimasi ideologis bagi kolonialisme Jepang daripada sebagai bentuk nyata persaudaraan Asia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa doktrin *Hakko Ichiu* berfungsi sebagai legitimasi ideologis bagi pendudukan Jepang di Indonesia pada periode 1942–1945. Sejak sebelum pendudukan berlangsung, doktrin ini telah menjadi bagian penting dari kebijakan ekspansi Jepang di kawasan Asia-Pasifik dan digunakan untuk membangun citra Jepang sebagai pemimpin serta pembebas bangsa-bangsa Asia dari imperialisme Barat. Dalam praktiknya, doktrin tersebut diterapkan secara sistematis dalam bidang pendidikan, propaganda media massa, dan mobilisasi sosial-politik.

Dalam bidang pendidikan, Jepang menghapus pengaruh pendidikan Barat dan menggantinya dengan sistem pendidikan yang menanamkan loyalitas kepada Kaisar Jepang melalui penggunaan bahasa Jepang, ritual *Seikerei*, latihan militer, serta kurikulum yang berorientasi pada kepentingan perang Asia Timur Raya. Dalam bidang propaganda media massa, Jepang memanfaatkan poster, film, radio, dan surat kabar untuk membangun citra sebagai pelindung Asia melalui slogan seperti Gerakan 3A. Sementara itu, dalam bidang sosial-politik, Jepang membentuk organisasi-organisasi massa seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan PETA sebagai alat mobilisasi masyarakat dan kontrol sosial.

Namun, penelitian ini menemukan adanya kontradiksi mendasar antara retorika persaudaraan Asia dalam doktrin *Hakko Ichiu* dengan realitas kolonialisme militer Jepang di Indonesia. Di balik propaganda persatuan Asia, Jepang tetap menjalankan praktik eksploitasi ekonomi, kerja paksa romusha, pengawasan ketat, serta tindakan represif melalui Kempeitai. Dengan

demikian, doktrin *Hakko Ichiu* tidak hanya berfungsi sebagai gagasan persatuan Asia, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk memperkuat kepentingan imperialisme Jepang di wilayah pendudukan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada analisis arsip surat kabar dan dokumen historis di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan doktrin *Hakko Ichiu* di wilayah lain seperti Sumatra, Sulawesi, atau Maluku agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak ideologi Jepang di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan kajian mengenai pengaruh propaganda Jepang terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia pasca-kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2018). Pendidikan di Indonesia pada masa Jepang. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 64–69.
- Aiko, K. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan sosial di pedesaan 1942–1945*. Depok: Komunitas Bambu.
- Bataviaasch Nieuwsblad. (1941, March 13). *Hitler faalde als revolutionnair*.
- Cangara, H. (2000). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- De Sumatra Post. (1941, February 8).
- De Sumatra Post. (1941, January 22).
- Djoenoed Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ebenstein, W. (1963). *Today's isms: Communism, fascism, capitalism, socialism*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Edwards, W. (2003). *Modern Japan: A historical overview*. New York, NY: Facts On File.
- Gorman, J. L. (2009). *Pearl Harbor: A primary source history*. New York, NY: Gareth Stevens.
- Ham, O. H. (1989). *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT Gramedia.
- Het Dagblad. (1945, August 11).
- Javaasche Courant. (1941, June 12).
- Jowett, G. S., & O'Donnell, V. (2018). *Propaganda & persuasion* (7th

- ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kan Pō. (1942). *Kan Pō, Nomor 1, Tahun ke-1, Bulan 8–2602/1942*. Pemerintah Militer Jepang.
- Kan Pō. (1942). *Kan Pō, Nomor Istimewa, 7–3–2602/1942*. Pemerintah Militer Jepang.
- Kratoska, P. H. (1997). *The Japanese occupation of Malaya: A social and economic history*. Honolulu, HI: University of Hawai'i Press.
- Kurasawa, A. (1987). *Mobilisasi dan kontrol: Studi tentang perubahan sosial di Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942–1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan sosial di pedesaan 1942–1945*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kurasawa, A. (2016). *Masyarakat dan perang Asia Timur Raya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Notosusanto, N., & Djoened, M. (2008). *Sejarah nasional Indonesia jilid VI: Zaman Jepang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanti, N. (2018). Pendudukan Jepang pada tahun 1942–1945 di Rembang. *Jurnal Noken*, 6(1), 77–94.
- Putri, T. A., Syaiful, M., & Arif, S. (2018). Propaganda Jepang dalam melancarkan kebijakan pendidikan di Indonesia tahun 1942–1945. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 6(1), 76–88.
- Rommelink, W. (2018). *The operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal*. Leiden: Leiden University Press.
- Saminto, S. S. (2019). Peran pendidikan di masa kependudukan Jepang (1942–1945).
- Sedana, A. K. (2015). *Sejarah pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademik.
- Shiraishi, T. (1986). *Zaman bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa 1912–1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.